



newsletter

Tanhana Dharma Mangrva • edisi 106, Mei 2018



Peserta PPRA LVII Diskusi terkait Terorisme dengan Mahasiswa US Army War College (hal. 4)

2. Gubernur Lemhannas Lakukan Lawatan ke Negeri Tirai Bambu
3. Ketua Prodi Master of Science RSIS Berikan Ceramah terkait Laut Cina Selatan
4. Peserta PPRA LVII Diskusi terkait Terorisme dengan Mahasiswa US Army War College
5. Perista Kenali Batik Lebih Dalam bersama Didi Budiardjo
5. Lantik 15 Orang Pejabat, Agus Widjojo Tekankan Peningkatan Kinerja
6. Purnomo Yusgiantoro: NKRI adalah Archipelago State Terbesar di Dunia
7. Kepala BNPT Bicara Terorisme dan Radikalisme di Hadapan Peserta PPRA LVII
8. Prof. Muladi Berbagi Cara Menjadi Pemimpin yang Berkualitas
9. IKKT Pragati Wira Anggini Peng-hubung 02 Lemhannas RI Gelar Pertemuan Perdana
10. Menlu Retno Marsudi Cerita Upaya Diplomasi Indonesia Kepada Peserta PPRA LVII
11. Lemhannas RI Perkuat Wawasan Kebangsaan Elemen Masyarakat di Jawa Tengah
11. PPRA LVII Kenali Budaya Kerja ASN
12. Sebelum Mulai *On Campus*, Peserta PPRA LVIII Wajib Ikuti *Outbound*
13. Lemhannas RI Tandatangani MoU dengan RSIS NTU
13. Kuliah Umum Gubernur Lemhannas RI di RSIS Singapura
14. Mahasiswa IKIP Veteran Semarang Perdalam Wawasan Kebangsaan
15. Partisipasi Perpustakaan Lemhannas RI dalam Perpunas Expo 2018



Gubernur Lemhannas Lakukan Lawatan ke Negeri Tirai Bambu

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Drs. Arif Wachyunadi serta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Negeri Tirai Bambu Tiongkok pada tanggal 27 Maret – 3 April 2018.

Lawatan Gubernur ke Tiongkok kali ini dalam rangka memenuhi undangan dari China Institute for International Strategic Studies (CIISS) untuk melakukan diskusi tentang isu-isu strategis, baik dalam tataran regional yakni antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN, maupun ruang lingkup global antara Tiongkok dan dunia Internasional. Beberapa hal yang dibahas dalam diskusi tersebut mengenai sektor ekonomi, pertahanan, energi, keamanan siber, perubahan iklim, ketersediaan air, dan penggunaan sosial media.

Di hari pertama berada di Beijing, Tiongkok, Gubernur beserta rombongan melakukan kunjungan ke perusahaan Internet Security 360 yang berkomitmen untuk memecahkan berbagai masalah keamanan yang dihadapi oleh pengguna Internet di Tiongkok dengan menyediakan layanan keamanan gratis berkualitas tinggi. 360 meyakini bahwa keamanan Internet, seperti pencarian (browsing), berkirim e-mail, dan pengiriman pesan instan, adalah layanan dasar Internet dan seharusnya gratis.

Keesokan harinya, rombongan Lemhannas RI berkesempatan mengunjungi China Electronic Technology Corporation (CETC), yakni satu-satunya perusahaan teknologi berskala besar di Tiongkok yang mencakup semua bidang dalam informasi elektronik.

Sementara terkait dengan salah satu fungsi utama Lemhannas RI yakni menyelenggarakan pendidikan bagi kader-kader pimpinan tingkat nasional, Lemhannas juga melakukan kunjungan ke Tshinghua University bersama dengan perwakilan dari Unity In Diversity (UID). Pada kesempatan tersebut dilakukan pertukaran informasi akademik antara kedua institusi yang dijadikan dasar dalam pembangunan kerja sama pada waktu mendatang.

Tidak hanya itu, industri China Aerospace Long-March International Trade (ALIT) yang merupakan perusahaan eksportir dan importir peralatan dan teknologi terkait kedirgantaraan, dan China North Industry Group Corporation (NORICO) yang merupakan badan utama penelitian dan pengembangan senjata dan peralatan pasukan darat, menjadi salah satu target kunjungan Gubernur Lemhannas RI beserta rombongan.

Di hari terakhir berada di Tiongkok, rombongan menyempatkan berkunjung ke beberapa lokasi wisata yang cukup terkenal dan menjadi icon Beijing dan Shanghai Tiongkok, seperti Olympic Stadium, Lapangan Tiananmen, Forbidden City, Museum National Beijing, Shanghai Pearl Tower, serta Exhibition Hall. ●

“

Beberapa hal yang dibahas dalam diskusi tersebut mengenai sektor ekonomi, pertahanan, energi, keamanan siber, perubahan iklim, ketersediaan air, dan penggunaan sosial media.”

Ketua Prodi Master of Science RSIS Berikan Ceramah terkait Laut Cina Selatan

Peserta PPRA LVII dan LVIII Angkatan 2018 menerima kuliah umum dari Ketua Program Studi Master of Science S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Dr. Bernard Loo Fook Weng yang mengangkat topik “Tiongkok dan Penolakan Wilayah Anti Akses (A2AD) di Laut Cina Selatan (LCS) serta Implikasinya untuk Asia Tenggara” di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lemhannas RI, (3/4) pagi.

Dalam diskusi tersebut, Dr. Bernard memaparkan klaim Tiongkok di LCS yaitu Operasi Asimetris yang melibatkan penjaga pantai dan pembangunan pulau buatan dan militerisasi berkelanjutan. Terkait operasi asimetris, Dr. Bernard menyampaikan Tiongkok melakukan berbagai upaya dalam mengklaim LCS diantaranya pengenaan di Zona Identifikasi Pertahanan Udara, tindakan militer di laut, serta taktik asimetris di laut. Dr. Bernard juga menyampaikan tentang sejarah terjadinya bentrokan bersenjata di LCS.

Dr. Bernard memaparkan taktik asimetris yang dilakukan Tiongkok di wilayah LCS diantaranya dengan merancang ulang kapal bekas PLAN (angkatan laut Tiongkok) untuk dipergunakan sebagai kapal penjaga pantai wilayah Tiongkok. Selain itu, taktik ini juga didukung dengan kapal militan maritim, nelayan yang dipersenjatai dikenal dengan “*Little Blue Man*” dan dianggap sejajar dengan kapal milik Rusia yakni “*Little*

Green Man” di Crimea. Sejak tahun 2014, kapal militan tersebut semakin berkembang dan sering merekrut personel purnawirawan PLAN.

Dr. Bernard kemudian memaparkan upaya lain Tiongkok dalam melakukan klaim terhadap LCS dengan membangun pulau-pulau buatan di Tiongkok sejak tahun 2014, yang diklaim dapat melindungi kapal-kapal nelayan selama musim topan. Bukti menunjukkan bahwa pulau-pulau buatan tersebut sedang dimiliterisasi. Selain itu, Dr. Bernard juga memaparkan mengenai strategi Tiongkok dalam menguasai wilayah LCS yang dikenal dengan strategi kubis yaitu dengan mengumpulkan kekuatan sedikit demi sedikit di sekitar Laut Cina Selatan.

Kegiatan Ceramah ini kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang melibatkan peserta PPRA LVII dan LVIII dan ditutup dengan foto bersama serta penyerahan cenderamata.●

“*Klaim Tiongkok di LCS yaitu Operasi Asimetris yang melibatkan penjaga pantai dan pembangunan pulau buatan dan militerisasi berkelanjutan.*”

*Ketua Program Studi Master of Science S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)
Dr. Bernard Loo Fook Weng*



Peserta PPRA LVII Diskusi terkait Terorisme dengan Mahasiswa US Army War College

Prof. Zachry Abuza bersama dengan mahasiswanya dari US National War College bertandang ke Lemhannas RI untuk melakukan diskusi dan tukar pendapat dengan beberapa orang peserta PPRA LVII. Kegiatan diskusi mengangkat dua topik besar yakni Terorisme dan Kejahatan Transnasional yang diadakan di Anjungan Gedung Trigatra Lemhannas RI, Senin (9/4) siang.

Tujuan diadakannya diskusi ini untuk mempresentasikan tentang Kesuksesan Indonesia dalam penegakan hukum menanggulangi terorisme, serta Strategi Indonesia dalam menghadapi kejahatan Transnasional. Diskusi dipandu oleh Tenaga Profesional Bidang Kepemimpinan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang sebagai Moderator, dan Irjen. Pol. Dr. Drs. H. Anas Yusuf, Dipl.krim., S.H., M.H., M.M. sebagai pemapar.

Dalam paparannya, Anas menyampaikan bahwa Indonesia telah diakui oleh negara-negara sahabat sebagai negara yang berhasil menanggulangi kasus-kasus terorisme. Di antaranya kasus Bom Bali Satu dan Dua, Bom di Hotel JW Marriot, Bom di Kedutaan Besar Australia di Kuningan Jakarta, dan kejadian terorisme lainnya.

Menurutnya, pencapaian tersebut karena dukungan dan kerjasama yang

erat antara semua pemangku kepentingan dan instansi-instansi terkait. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa instansi yakni BNPT, BIN dan TNI. Anas juga menjelaskan mengenai strategi Indonesia dalam menanggulangi aksi terorisme dengan mempraktekkan dua pendekatan, yaitu soft power dan hard power. Kasus lain yang cukup mendapat perhatian adalah perdagangan manusia, pencucian uang, korupsi, kejahatan dunia maya, kejahatan lingkungan, dan perdagangan hewan yang terancam punah, serta kejahatan ekonomi transnasional.

Sementara Prof. Zachry Abuza menyampaikan bahwa kehadirannya untuk mengapresiasi atas capaian Indonesia selama ini yang mampu menanggulangi terorisme. "Saya ke sini datang untuk mengapresiasi atas apa yang Indonesia telah capai selama ini dalam menanggulangi terorisme, dalam berdemokrasi, penegakan hukum, dan penegakan HAM. Makanya saya bawa mahasiswa ke sini," ujarnya. Ia berpendapat bahwa Indonesia memiliki berbagai institusi yang mampu bekerja dengan baik dalam penanggulangan terorisme.

"Terorisme sangat dipengaruhi oleh tren global. Yang harus dipikirkan adalah apa yang akan terjadi setelah Suriah kolaps. Apa tren ke depan? Apa yang harus kita fokuskan? Apakah kita harus fokus

pada jaringan ISIS?" tanya Prof. Zachry kepada para peserta diskusi. Menurutnya, Indonesia perlu memikirkan tren terbaru apa yang akan terjadi, seperti masalah yang terjadi di Myanmar, dan Bangladesh.

Zachry berharap seluruh komponen bangsa mampu berperan aktif dalam mengelola bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan. "Saya meminta teman saya di sini, di Indonesia untuk berperan aktif memimpin kawasan ini, terutama dalam manajemen perbatasan. Kalian perlu bekerja sama dengan Negara lain seperti Malaysia, Thailand," ujarnya.●

"Indonesia telah diakui oleh negara-negara sahabat sebagai negara yang berhasil menanggulangi kasus-kasus terorisme"

*Irjen Pol. Dr. Drs. H. Anas Yusuf,
Dipl.krim., SH., MH., MM.*



Perista Kenali Batik Lebih Dalam bersama Didi Budiardjo



Persatuan Istri Anggota (Perista) Lemhannas RI menyelenggarakan acara pertemuan rutin para anggotanya beserta karyawan Lemhannas RI sebagai ajang silaturahmi dan berbagi ilmu dengan menghadirkan narasumber yakni seorang desainer ternama, Didi Budiardjo, untuk memberikan pengenalan mengenai Batik, di Ruang Dwiwarna Purwa Lemhannas RI, Rabu (4/4).

Ketua Perista Herlina Agus Widjojo pada saat membuka kegiatan pertemuan, mengenang perjuangan R.A Kartini sebagai pahlawan yang memajukan peradaban perempuan Indonesia, salah satunya dengan mengajak untuk membatik. "Saat beliau dipingit, dia mengumpulkan perempuan di sekelilingnya untuk membatik, dan hari ini kita sudah kehadiran seseorang yang masih muda dan sangat mengerti tentang batik, ialah Didi Budiardjo," ujar Herlina. Didi Budiardjo kemudian memperkenalkan secara mendetail tentang filosofi batik, sembari menunjukkan koleksi-koleksi batik miliknya. Menurutnya, pengertian batik sendiri adalah satu teknik yang berkembang di Indonesia dengan menggunakan Rintang Warna Malam/Lilin. Didi berulang kali menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara Batik dan Tekstil Motif Batik, yakni Tekstil Motif Batik menggunakan metode printing, berbeda

dengan Batik sesungguhnya yang menggunakan penghalang/perintang warna malam dalam proses pembuatannya. "Disebut batik apabila melalui proses warna malam, apakah batik tulis ataupun batik cap," ujar Didi.

Sembari diperdengarkan Gending Pakurmatan, yakni Gending yang dimainkan saat Raja menyambut tamu-tamunya, Didi Budiardjo yang menunjukkan koleksi batik-batik yang mampu mengubah suasana di Ruang Dwiwarna layaknya di dalam Keraton. Batik dibagi menjadi dua bagian, yakni Batik Keraton dan Batik Pesisiran. Ia menjelaskan bahwa di Keraton terdapat 11 motif larangan, di antaranya yang paling terkenal adalah motif Parang. "Kalau orang Jawa berkunjung ke Keraton sebaiknya tidak menggunakan motif Parang, karena hanya diperuntukkan bagi keluarga Raja dan Raja," jelasnya.

Selain itu, Didi juga menceritakan tentang awal mula keberadaan batik yang berasal dari masyarakat agraris. "Nenek moyang bangsa Indonesia juga merupakan bangsa agraris, mereka bercocok tanam dan belum masuk ke Keraton. Batik Bang-bangan adalah cikal bakal dari batik, yang berwarna merah. Ketika masuk Keraton, batik menjadi lebih beragam," katanya.

Batik telah dinobatkan sebagai salah satu Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober dikenal sebagai Hari Batik Nasional. ●

Lantik 15 Orang Pejabat, Agus Widjojo Tekankan Peningkatan Kinerja

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik 15 orang pejabat eselon I, II, III dan IV sekaligus melepas 9 orang pejabat eselon I dan II di lingkungan Lemhannas RI, Kamis (5/4) pagi di Ruang Nusantara Gedung Trigatra Lemhannas RI. Agus Widjojo berpesan agar para pejabat yang baru dilantik mampu aktif dan menerapkan standar tinggi dalam bekerja dan menularkan komitmen kuat pada semua lini. "Saya yakin berbekal pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, saudara mampu merubah pola pikir dan pola budaya kerja yang berorientasi pada efisiensi, efektifitas, produktifitas dan profesionalisme," ujar Agus Widjojo.

Menurutnya, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan momentum penting yang memberikan manfaat besar bagi organisasi. "Pelantikan dan pengangkatan sumpah janji pejabat diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan kinerja organisasi yang selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang telah menjadi komitmen bersama," terangnya.

Kesuksesan sebuah organisasi ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya dilihat dari sosok pemimpinnya. "Kepemimpinan dan keteladanan saudara sangat menentukan sukses dan lancarnya program maupun sasaran organisasi. Karena sikap pemimpin sangat menentukan sikap bawahan dan pegawai lainnya," katanya.

Terlebih saat ini di Lemhannas RI sedang dilakukan restrukturisasi organisasi dimana telah dilakukan perubahan susunan organisasi dan tata kerja. Perubahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut tiga aspek,

yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM Aparatur. Oleh karena itu, pejabat yang baru dilantik turut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, organisasi yang tertata, dan proses bisnis yang efektif dan efisien.

Agus Widjojo pun tak lupa mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada 9 orang pejabat yang dilepas, karena telah mengabdikan kepada lembaga, serta Ia yakin bahwa prestasi dan kinerjanya akan menjadi catatan inspirasi bagi generasi penerus di Lemhannas RI.

Turut hadir dalam upacara pelantikan Wakil Gubernur Lemhannas RI, Sekjen IKAL, Sekretaris Utama Lemhannas RI, Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional, Pejabat Struktural, Ketua dan Pengurus Perista. ●



Purnomo Yusgiantoro: NKRI adalah Archipelago State Terbesar di Dunia



“Pokok permasalahannya sengketa LCS itu adalah sengketa kedaulatan antara RRT versus lima negara terutama ASEAN. Karena Tiongkok melakukan klaim yang dikenal dengan *nine dash line* atau sembilan garis putus, maka negara-negara ini juga melakukan klaim”

**Menteri Pertahanan Era SBY
Prof. Purnomo Yusgiantoro,
Ir, MA, MSc, Ph.D.**

Menteri Pertahanan era SBY, Prof. Purnomo Yusgiantoro, Ir. M.A., M.Sc., Ph.D. menjadi salah satu pengisi materi dalam diskusi panel yang diikuti oleh peserta PPRA LVII, dengan mengangkat topik seputar Implementasi Ketahanan Nasional dalam menghadapi Agresifitas Tiongkok di Laut Cina Selatan guna mendukung Pembangunan Pertahanan RI, di Ruang NKRI Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Rabu (11/4) pagi.

Diawal pemaparan materi, Purnomo menjelaskan terkait pokok permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan (LCS) yakni sengketa kedaulatan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan lima negara lain yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. “Pokok permasalahannya sengketa LCS itu adalah sengketa kedaulatan antara RRT versus lima negara terutama ASEAN. Karena Tiongkok melakukan klaim yang dikenal dengan *nine dash line* atau sembilan garis putus, maka negara-negara ini juga melakukan klaim,” katanya.

Menurut Purnomo, Tiongkok melakukan klaim atas LCS berdasarkan

sejarah masa lalunya, dan utamanya berada pada pulau Spratly dan Paracel. Implikasinya terhadap Indonesia, di kawasan tersebut terdapat *sea lines of communication* (SLOC) dimana Laut Cina Selatan merupakan jalur perdagangan vital bagi Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sehingga banyak kapal-kapal Indonesia yang melintas di kawasan LCS.

Purnomo yang juga alumni dari PPRA 50 Lemhannas RI menjelaskan bahwa Indonesia diminta untuk mengikuti prinsip hukum yang telah ditetapkan atas sengketa LCS. Ia menekankan prinsip dasar yang dipegang oleh bangsa Indonesia bahwa laut bukanlah sebagai pemisah pulau, tetapi Indonesia merupakan laut yang ditaburi oleh pulau.

Luas wilayah negara Indonesia mengalami perluasan sebesar 3,5 kali jika dibandingkan pada saat awal kemerdekaan yakni dari semula 2,13 juta kilometer kini menjadi 7,39 juta kilometer. Purnomo menjelaskan bahwa membesarnya wilayah Indonesia disebabkan adanya Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut (UNCLOS), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.

Purnomo mengungkapkan fakta menarik yakni NKRI adalah Archipelago

State terbesar di dunia, yang dalam pengelolaannya lebih kompleks jika dibandingkan dengan negara kontinental. “Karena itu menyangkut infrastruktur, transportasi, komunikasi, kontrol, dan proteksi, daerah-daerah yang begitu besar, itu adalah masalah-masalah ketahanan nasional, itu perlu perhatian khusus dua sisi mata uang terutama kesejahteraan dan keamanan,” jelas mantan Wakil Gubernur Lemhannas RI ini.

Menurutnya, diperlukan adanya transformasi cara pandang geopolitik, wawasan nusantara, dan geostrategi Indonesia dalam hal ini ketahanan nasional. “Laut harus dipandang sebagai pemersatu, pendekatannya melalui kesejahteraan dengan keamanan. Karena kultur masyarakat yang masih berorientasi pada daratan. Kemudian pengelolaan sumber di laut, ZEE dan landas kontinental masih belum maksimal. Selain itu harus ada penegasan batas wilayah dengan kehadiran pasukan TNI,” pungkasnya. ●

Kepala BNPT Bicara Terorisme dan Radikalisme di Hadapan Peserta PPRA LVII

Peserta PPRA LVII kali ini kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, M.H. dalam rangka memberikan ceramah terkait Mewaspada pengaruh gerakan radikalisme era global terhadap nasionalisme dan eksistensi NKRI, Selasa (10/4) di Ruang NKRI Gedung Pancagatra Lemhannas RI. Dalam ceramahnya, Suhardi memaparkan tentang perkembangan radikalisme ke arah terorisme.

Menurutnya, paham radikalisme mengalami perubahan secara total dan bersifat revolusioner, dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada. Terdapat beberapa faktor yang memotivasi perubahan tersebut yakni faktor internasional seperti ketidakadilan global dan politik luar negeri yang arogan. Yang kedua yakni faktor domestik di antaranya persepsi ketidakadilan hingga balas dendam, serta faktor kultural seperti pemahaman agama yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit.

Suhardi mengatakan bahwa baru-baru ini BNPT berhasil mengamankan 18 orang anak kecil yang berpotensi menjadi teroris. "Ada 18 org yang diselamatkan oleh BNPT yang berpotensi menjadi teroris karena terlibat dalam pelatihan militer di Syria," ujarnya. Suhardi menekankan agar mengubah pandangan terorisme yang mengaitkan dengan stigma agama. "Jangan stigmakan agama, saya muslim ini penyimpangan. Kekejamannya mengatasnamakan agama," tegasnya.

Di BNPT, ungkap Suhardi, terdapat alat yang digunakan untuk menganalisis kejadian-kejadian radikalisme di seluruh dunia. Pola baru terorisme yakni cyber jihad dan khilafah, *self radicalizaton*, indoktrinasi online, rekrutmen dan pembantaian online serta *lone wolf*.

Oleh karena itu, BNPT merekrut duta-duta damai dari generasi muda karena yang menjadi sasaran pencucian otak dari kelompok radikal adalah anak-anak muda karena masih mencari identitas, masih labil emosionalnya, dan mudah dipengaruhi. "Target *brain washing* itu 15-25 tahun. Mereka pintar, mencari jati diri, dan emosi masih stabil, gampang dimasuki. Disitulah kita masuk. Mereka harus menyebarkan anti radikal dan pesan damai dengan bahasa milenial, jangan pake bahasa kita," sebutnya.

Suhardi yang juga alumni dari PPSA 17 berpesan kepada para peserta PPRA LVII sebagai calon-calon pimpinan nasional agar memanfaatkan kesempatan belajar di Lemhannas dengan sebaik mungkin. "Pandai-pandailah melihat situasi saat ini, tanggung jawab moral, bangsa ini milik anak cucu kita, globalisasi merubah dunia. Karena perkembangan teknologi digital mempengaruhi dinamika geo politik. Kita titipkan pada teman-teman PPRA, 5 sampai 10 tahun kedepan. Anda sudah mendapat kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin belajar di Lemhannas, hal ini punya kebanggaan tersendiri," katanya.●

“Pola baru terorisme yakni cyber jihad dan khilafah, *self radicalizaton*, indoktrinasi online, rekrutmen dan pembantaian online serta *lone wolf*.”

Kepala BNPT
Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH.





“Negara harus mempertahankan budaya, kita tidak boleh berpikir secara fragmentis atau sepotong-sepotong, tetapi harus berpikir sistemik, dan berorientasi pada tujuan yang besar atau grand strategy”

Mantan Gubernur
Lemhannas RI
Prof. Dr. Muladi, SH

Prof. Muladi Berbagi Cara Menjadi Pemimpin yang Berkualitas

Mantan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Muladi, S.H. menyambangi para peserta PPRA LVII dalam rangka memberikan ceramah terkait “Cara Memilih Pemimpin dalam Praktik Kepemimpinan Guna Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan” di Ruang NKRI Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Rabu (18/4).

Seorang pemimpin yang baik menurutnya haruslah seseorang yang mampu berpikir secara rasional bukan dengan emosional. “Pemimpin yang super power itu harus berdarah dingin dan baik, mempunyai pemikiran yang sifatnya rasional daripada emosional. Pemimpin itu dipilih karena visi dan misinya yang menjanjikan,” ujar Prof. Muladi.

Ada satu pemikiran dimana pemimpin harus melihat sebagai mekanisme pengintegrasian, menganggap kemajuan teknologi, ekonomi dan lain-lain sebagai sumber daya itu tidak menjadi masalah, namun yang terpenting adalah tujuan politik apa yang ingin dicapai oleh suatu negara. “Negara harus mempertahankan budaya, kita tidak boleh berpikir secara fragmentis atau sepotong-sepotong, tetapi harus berpikir sistemik, dan berorientasi pada tujuan yang besar atau grand strategy,” tegasnya.

Yang selanjutnya tidak kalah pentingnya sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin yakni dapat melihat segala persoalan

secara menyeluruh, karena setiap subsistem saling terkait satu sama lain. “Bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tapi menyeluruh. Kalau merubah sesuatu pasti yang lain bisa berubah dan ada keterbukaan antar subsistem yang tidak boleh di tutup-tutupi, harus transparansi,” ujarnya.

Bagi Prof. Muladi, sosok pemimpin harus mampu mengendalikan kehidupan, baik organisasi kecil maupun nasional, dimana orang bisa memotivasi pengikutnya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan bersama. “Inti dari kepemimpinan ada visi ada simpati. Visi jelas mengenai kehidupan, dan menimbulkan simpati, baik internal maupun eksternal antar negara,” katanya.

Prof. Muladi juga memaparkan terkait beberapa karakter sistem demokrasi yang baik seperti desentralisasi kewenangan, adanya promosi (kemajuan) dan perlindungan HAM, kebebasan pers yang harus dikawal secara profesional, penghargaan terhadap *civil society* seperti eksistensi dari berbagai LSM maupun kelompok masyarakat madani, serta kontrol sipil terhadap militer. Kepemimpinan terbagi atas empat kelompok, yakni *Leadership*, *Manajerial*, *Statesmanship* (Negarawan), dan *Geo Leadership*.●

IKKT Pragati Wira Anggini Penghubung 02 Lemhannas RI Gelar Pertemuan Perdana

Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI Pragati Wira Anggini (IKKT PWA) Penghubung 02 Lemhannas RI menggelar pertemuan untuk pertama kalinya yang diikuti seluruh anggotanya, Kamis (12/4) pagi di Ruang Dwiwarna Purwa Lemhannas RI. Tujuan diselenggarakannya pertemuan ini untuk menguatkan hubungan dan persatuan istri-istri prajurit TNI yang bertugas di Lemhannas RI. Organisasi ini merupakan perpanjangan dari organisasi induk IKKT Pragati Wira Anggini yang berkedudukan di Mabes TNI.

Rini Bagus Puruhito sebagai Ketua IKKT PWA Penghubung 02 Lemhannas RI mengatakan bahwa memasuki era millennial, para istri TNI harus mampu mengasah kepekaannya terhadap perubahan lingkungan. "Kita harus mempertajam kepekaan terhadap ancaman, radikalisme dan bahaya narkoba yang berpotensi mengancam anak-anak kita. Kita sebagai orang tua perlu sangat waspada dalam melindungi anak-anak kita, keluarga, dan lingkungan," ujar Rina.

Disamping waspada terhadap berbagai ancaman, Rina juga berpesan agar para

anggotanya mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam hal ini internet secara cerdas. "Kita juga harus mampu mengasah diri dalam penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Karena paham-paham radikalisme dengan mudah dapat disebarluaskan melalui internet. Media sosial hendaknya digunakan dengan bijak untuk menjaga kehormatan diri, suami, dan institusi. Seraya terus memanfaatkan kemajuan teknologi secara cerdas," ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan terkait hasil Musyawarah Pusat (Mupus) ke VIII IKKT PWA Tahun 2018 yang dilaksanakan pada 21 Februari 2018. Sosialisasi hasil Mupus bertujuan agar para anggota mengetahui adanya perubahan dan penambahan di dalam AD/ART, Juklak, Atribut, Renja, dan Jukminu maupun Jukminku.

Kegiatan pertemuan juga dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, beserta Ketua Perista Ninik Agus Widjojo, Wakil Gubernur Marsdya TNI Bagus Puruhito, dan Sekretaris Utama Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi. Dalam sambutannya, Agus Widjojo menitipkan amanat kepada para anggota IKKT PWA Penghubung 02 Lemhannas RI agar

berkomitmen penuh dalam menjalankan peran dan pengabdian kepada organisasi. "Amanat yang telah diberikan hendaknya di laksanakan dengan semangat dan penuh dedikasi, serta berorientasi kepada peningkatan kinerja organisasi," katanya.

Agus Widjojo mengingatkan kembali tujuan awal dibentuknya IKKT PWA Penghubung 02 Lemhannas RI bahwa sebagai wadah komunikasi bagi para istri anggota TNI, untuk menciptakan hubungan erat yang bersifat kekeluargaan. Diharapkan pula organisasi ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan lingkungan, tanpa meninggalkan identitasnya sebagai organisasi yang memelihara dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga prajurit.●

"Kita harus mempertajam kepekaan terhadap ancaman, radikalisme dan bahaya narkoba yang berpotensi mengancam anak-anak kita"

Ketua IKKT PWA Penghubung 02 Lemhannas RI Rini Bagus Puruhito



Menlu Retno Marsudi Cerita Upaya Diplomasi Indonesia Kepada Peserta PPRA LVII

Menteri Luar Negeri RI Y.M Retno L.P Marsudi hadir sebagai penceramah dalam kelas PPRA LVII dengan bahasan mengenai Kebijakan Luar Negeri dalam Menghadapi Perkembangan Geopolitik Internasional, di Ruang NKRI Lemhannas RI, Jumat (20/4) Siang. Retno bercerita tentang berbagai diplomasi yang dilakukan oleh Kemenlu selama beberapa tahun terakhir, seperti pada tahun 2017 sebanyak 10 ribu kasus hukum yang menyangkut Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil diselesaikan oleh Kemenlu, dari 15.454 kasus yang terjadi. "Dalam satu tahun, kita dapat menyelesaikan 10 ribu, sisanya kasus berat yang tidak dapat diselesaikan secara cepat dalam waktu satu tahun," ujarnya.

Menurutnya, terjadi penurunan kasus dari tahun 2016 ke tahun 2017, dan terjadi peningkatan persentase untuk penyelesaian kasus. "Dalam 2016, dari 18.452 kasus diselesaikan sebanyak 12.969 kasus, terjadi penurunan kasus yang berarti baik buat kita, dan terjadi kenaikan persentase untuk penyelesaian kasus, yang juga baik untuk kita," katanya. Seperti kasus penyanderaan yang terjadi di Filipina Selatan, dimana korban terbanyak adalah WNI. "Banyak kasus penyanderaan di Filipina Selatan, di perairan Sulu dan sekitarnya, dan Indonesia adalah negara yang paling banyak *victim*. Sandera yang diambil dari Indonesia adalah yang paling banyak yaitu 32 orang, kita sudah dapat membebaskan 29 orang. Saya masih terus berupaya tiga orang yang di Filipina Selatan dapat dibebaskan," ujar Retno.

Baru-baru ini Kemenlu meluncurkan sebuah aplikasi "Safe Travel" yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia

apabila hendak bepergian ke luar negeri, dapat mengetahui apabila terjadi masalah di negara yang sedang dikunjungi. "Bisa dimanfaatkan jika bepergian ke luar negeri. Tinggal menginput data pribadi dan negara tujuan, melalui aplikasi *safe travel* kita akan mendapat informasi dari sistem yang kita bangun, dan tau kemana harus minta perlindungan. Aplikasi ini terbaru yang dimiliki untuk meningkatkan perlindungan WNI yang bepergian di luar negeri," ucapnya.

Upaya diplomasi lain yang baru saja dilakukan oleh Menlu Retno, yakni pernah mengunjungi TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di luar negeri, untuk menderang secara langsung keluhan yang mereka alami. "Kadang-kadang keluhannya tidak pada saat mereka bekerja di luar negeri, melainkan pada saat mereka tiba di Indonesia. Misal mereka memegang duit *cash* selama kerja, sampe di *airport* Indonesia ada saja yang meminta mengganggu. Kita harus berubah, mental palak memalak harus dipotong, mentalitas korupsi harus dibasmi sampai habis, keberpihakan kita menjadi prioritas kami," tegasnya.

Yang terakhir Menlu Retno Marsudi bercerita kepada peserta PPRA akan keberhasilannya dalam memperjuangkan untuk memiliki *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers* dalam konteks ASEAN. Retno berkesimpulan bahwa Indonesia akan terus secara aktif memainkan peran di dunia internasional, baik untuk memepjuangkan kepentingan nasional bangsa Indonesia maupun untuk berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan dan perdamaian dunia.●

**"Dalam 2016,
dari 18.452 kasus
diselesaikan sebanyak
12.969 kasus, terjadi
penurunan kasus yang berarti
baik buat kita, dan terjadi
kenaikan persentase untuk
penyelesaian kasus, yang juga
baik untuk kita"**

**Menteri Luar Negeri RI
Y.M Retno L.P Marsudi**



Lemhannas RI Perkuat Wawasan Kebangsaan Elemen Masyarakat di Jawa Tengah



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan tersebut di Hotel Patra Jasa, Semarang, Rabu (17/4) menyatakan agar peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat memanfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin untuk berdiskusi tentang permasalahan kebangsaan dan bernegara dan menggali nilai-nilai wawasan kebangsaan.

“Dengan adanya diskusi dan tanya jawab tentang permasalahan kebangsaan dan bernegara dengan perspektif wawasan kebangsaan, para peserta akan memiliki cakrawala pandang yang semakin utuh dan luas mengenai nilai-nilai kebangsaan dan mampu menampilkan diri sebagai birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, TNI dan Polri yang lebih baik lagi dengan memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Agus Widjojo.

Sejumlah pejabat daerah hadir dalam pembukaan kegiatan ini. Plt Gubernur Jateng Drs. H. Heru Sudjatmoko, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto, Wakil Kepala Polda Jateng Brigjen Pol Ahmad Luthfi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Priyanto, S.H., Kepala BIN Daerah Jateng Brigjen TNI Agoes Joesni terlihat khidmat mengikuti kegiatan pembukaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Setelah kegiatan pembukaan usai, Gubernur Lemhannas RI bersama dengan Plt Gubernur Jateng Drs. H. Heru Sudjatmoko dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng K. H. Ahmad Daroji menjadi narasumber dalam acara Dialog Kebangsaan yang disiarkan TVRI Jateng, bersama Nesa Gosal sebagai moderator.●

Perkembangan lingkungan strategis di lingkup global dan regional, serta berbagai permasalahan kebangsaan yang dihadapi sekarang ini membutuhkan penyikapan dengan cara menguatkan wawasan kebangsaan kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan spirit tersebut, Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI, dan Polri di Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa, (17/4) hingga Selasa depan, (24/4), yang diikuti oleh 100 orang peserta.

Birokrat, akademisi, tokoh masyarakat, TNI dan Polri merupakan elemen penting yang menjadi penggerak di masyarakat. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) ini, mereka dapat mengaplikasikan dan menyebarluaskan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada masyarakat.

PPRA LVII Kenali Budaya Kerja ASN

Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Drs. Teguh Wijinarko memberikan paparan terkait peningkatan wawasan aparat birokrasi pemerintahan sebagai abdi negara kepada para peserta PPRA LVII di Ruang NKRI, Senin (16/4) pagi.

Di awal paparan, ia berbicara mengenai manajemen sistem nasional yakni pemerintahan dalam bernegara, dimana terdapat empat unsur didalamnya yang terbagi menjadi outer setting (tata kelola kehidupan masyarakat dan tata politik nasional), dan inner setting (tata laksana pemerintahan dan tata administrasi negara). “Sistem manajemen nasional adalah governance dari kita bernegara, ada unsur kemasyarakatan, pemerintahan, politik nasional, dan administrasi negara,” ujar Teguh.

Menurutnya, tanpa dukungan birokrasi yang baik, akan berimbas pada pembangunan yang juga tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, birokrasi selalu menjadi prioritas pembangunan pemerintah. Budaya kerja menjadi bagian penting yang sulit untuk dirubah karena berkaitan dengan mental model.

Seperti yang termuat dalam salah satu Nawacita Presiden Jokowi yang di antaranya berisi tentang bagaimana membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dan seterusnya. Salah satu aspek yang berkaitan dengan Nawacita tersebut yakni dengan menjalankan reformasi birokrasi.

Teguh menjelaskan bahwa Kementerian PANRB memiliki tiga tujuan utama yang termuat dalam roadmap reformasi birokrasi, yaitu membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel, kemudian menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta menghadirkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Berbicara mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Teguh menegaskan bahwa kunci dari birokrasi adalah SDM-nya, jika SDM-nya tidak berkualitas, maka birokrasinya pun tidak akan berkualitas. Menurutnya 60 persen tenaga kepegawaian pemerintah saat ini diisi oleh pegawai negeri yang terkait dengan tugas-tugas administratif, dan 40 persen terkait tugas teknis.

Kaitannya dengan meningkatkan wawasan ASN, Lemhannas turut andil sebagai pelaksana harian dalam melatih 1000 *technopreneurs* untuk di persiapkan agar mampu menghadapi revolusi industri 4.0. “Kita harus bersiap menghadapi, menyesuaikan elektabilitas kita terhadap perkembangan teknologi. Lemhannas juga dilibatkan dalam melatih 1000 *technopreneurs*, ikut dalam proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara nasional. Lemhannas sebagai pelaksana teknisnya,” ujarnya.●



Sebelum Mulai On Campus, Peserta PPRA LVIII Wajib Ikuti *Outbound*

U sai melaksanakan pendidikan *off campus* selama satu setengah bulan, peserta PPRA LVIII ditantang untuk mengikuti kegiatan *outbound* selama tiga hari sejak 7 - 9 Mei 2018 bertempat di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido, Sukabumi, Jawa Barat, yang bertujuan untuk menguatkan kebersamaan dan memantapkan strategi sebelum memulai pembelajaran on campus selama lima setengah bulan di Lemhannas RI.

Seluruh peserta sudah berkumpul di lapangan tengah Lemhannas RI untuk mengikuti upacara pembukaan *outbound* (7/5), dengan mengenakan pakaian bernuansa ungu tua dipadu dengan celana berwarna kuning kecokelatan. Upacara dipimpin oleh Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto sebagai Inspektur Upacara.

Menurut Karsiyanto, *outbound* ini bertujuan untuk mengenalkan para peserta satu sama lain, karena mungkin masih banyak di antara peserta yang tidak saling mengenal, dan untuk memperlancar berjalannya komunikasi selama berada di kelas nantinya. Kegiatan ini dirancang untuk memotivasi dan mempersiapkan peserta agar dapat bersikap tegas, efektif, serta memiliki pemahaman untuk mengendalikan emosi dalam bertindak dan mengambil kebijakan yang berdampak bagi orang-orang disekitarnya.

Outbound peserta PPRA LVIII diisi dengan sejumlah permainan menaklukan tantangan di alam terbuka. Para peserta ini diuji untuk menaklukan sejumlah tantangan seperti *Stretching and Ice Breaking, Team Challenge, Fun Filler, Flying Fox*, hingga *Sky Walk/Hi Cross the Tree*. Semua permainan ini punya satu maksud, yakni menguji kekompakan dan kerja sama tim peserta

PPRA LVIII yang selama lima bulan kedepan akan berada dalam satu kelas yang sama.

Hakikatnya kegiatan *outbound* untuk memupuk nilai-nilai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, semangat bela negara serta revolusi mental. Para peserta sebagai kader-kader pimpinan tingkat nasional diharapkan dengan mengikuti *outbound* ini dapat memiliki sikap dan perilaku yang dijiwai dengan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta menghayati empat konsensus dasar kebangsaan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika seperti yang selalu digaung-gaungkan Lemhannas RI.●

“Kegiatan ini dirancang untuk memotivasi dan mempersiapkan peserta agar dapat bersikap tegas, efektif, serta memiliki pemahaman untuk mengendalikan emosi dalam bertindak dan mengambil kebijakan yang berdampak bagi orang-orang disekitarnya.”

Deputi Pendidikan Tingkat Nasional
Mayjen TNI Karsiyanto



Lemhannas RI Tandatangani MoU dengan RSIS NTU Singapura

Pada Jumat (27/4), Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Executive Deputy Chairman dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University (NTU), Ambassador Ong Keng Yong yang dilaksanakan di Nanyang Technological University, Singapura.

Dalam MoU tersebut, Lemhannas RI dan RSIS NTU menyepakati untuk terus mendorong kerja sama dan melakukan kontak langsung antar staf pendidikan dan administrasi, jurusan dan bagian pengkajian dari kedua institusi.

Selain itu, Lemhannas RI dan RSIS NTU juga akan melakukan kerja sama dalam beberapa hal lain seperti saling melakukan kunjungan dan pertukaran peserta dan alumni pendidikan untuk penelitian dan pengkajian, melakukan kunjungan dan pertukaran staf untuk penelitian, mengajar, dan diskusi, tukar menukar informasi serta tukar menukar materi perpustakaan dan publikasi penelitian, dan melakukan kegiatan penelitian bersama.



Dalam MoU ini juga ditegaskan bahwa MoU tersebut tidak mengganggu otoritas kedua institusi, dan hal-hal mendetail mengenai MoU tersebut juga dijabarkan secara rinci. Agus Widjojo dalam kunjungan tersebut juga memberikan kuliah umum terkait dengan kemajuan profesionalisme dan kemakmuran reformasi dalam TNI. ●

Kuliah Umum Gubernur Lemhannas RI di RSIS, Singapura

Selain penandatanganan Nota Kesepahaman, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo juga memberikan kuliah umum di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura terkait Reformasi TNI pada Jumat (27/4).

Dalam ceramahnya, Agus Widjojo memaparkan bahwa pada awal kemerdekaan TNI memiliki fungsi tidak hanya di pertahanan namun juga di politik. Keterlibatan militer dalam politik pada saat itu dikarenakan peran TNI yang begitu besar pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga setelah kemerdekaan saat terjadinya pemberontakan komunis pada tahun 1948. Selain itu, yang menyebabkan fungsi politik dalam TNI adalah adanya tradisi panjang dalam budaya.

Reformasi TNI diakui Agus Widjojo, berjalan dengan sangat baik karena diprakarsai oleh internal TNI sendiri. Reformasi tersebut dimulai saat lengsernya era pemerintahan Presiden Soeharto dimana saat itu terjadi kekosongan kekuasaan dan juga pergantian sistem politik yang akan digunakan untuk menggantikan sistem politik di era sebelumnya.

Hal tersebut membuat TNI lebih berfokus pada perannya untuk menghadapi sistem politik baru yang lebih demokratis. Reformasi TNI sendiri, jelas Agus Widjojo, dilakukan pada tahun 1998 hingga 1999, sebelum dilakukan amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002. "Reformasi TNI yang diprakarsai oleh internal TNI sendiri, dilakukan sebelum reformasi politik," ujar Agus Widjojo.

Lebih lanjut Agus Widjojo mengungkapkan nilai strategis dari reformasi TNI antara lain yakni mendukung proses demokratisasi



di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dengan tidak terlibatnya TNI dalam sistem politik.

Reformasi TNI bukan sebuah reformasi yang digagas secara terstruktur namun dilakukan dengan cara *learning by doing* dibarengi dengan motivasi dan inovasi. Reformasi dikatakan Agus Widjojo menghadapi beberapa

“Reformasi TNI bukan sebuah reformasi yang digagas secara terstruktur namun dilakukan dengan cara *learning by doing* dibarengi dengan motivasi dan inovasi”

Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo

tantangan karena adanya dinamika sistem politik pada tahun 1999 hingga 2004 yang menuntut TNI untuk terus menyesuaikan dengan dinamika tersebut. ●



Mahasiswa IKIP Veteran Semarang Perdalam Wawasan Kebangsaan

Mahasiswa jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) IKIP Veteran Semarang melakukan kunjungan ke Lemhannas RI, Rabu (9/5) dalam rangka kuliah kerja lapangan yang diikuti 85 mahasiswa semester empat dan enam di ruang Syailendra Gd. Astagatra Lemhannas RI.

Kunjungan yang didampingi oleh empat orang dosen pembimbing, diterima langsung oleh Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi Lemhannas RI Kolonel Laut (P) Eddy Tarjono. Eddy berharap agar kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh semua mahasiswa untuk mendapatkan tambahan ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber yakni Taprof Bidang Politik Lemhannas RI Kisnu Haryo.

Sebelum memasuki materi yang lebih mendalam mengenai wawasan kebangsaan, yakni salah satu core inti Lemhannas RI, mahasiswa diajak bernostalgia ke tahun 1965 dimana untuk pertama kalinya Lemhannas

RI dibentuk sebagai Lembaga Pertahanan Nasional oleh Presiden Soekarno, dengan melihat video profile Lemhannas RI, diharapkan mahasiswa lebih mengenal secara mendalam sejarah berdirinya lembaga ini.

Kisnu Haryo yang menyampaikan materi mengenai Wawasan Kebangsaan untuk Menjaga Keutuhan NKRI dan Kepentingan Nasional, mengajak mahasiswa untuk mengenal makna wawasan kebangsaan yang merupakan cara pandang terhadap bangsa Indonesia, dimana wawasan kebangsaan untuk pertama kalinya diperkenalkan pada masa pergerakan politik era Budi Utomo.

"Disitulah mulai wawasan kebangsaan untuk pertama kalinya, karena perjuangan Pangeran Diponegoro bukan untuk keseluruhan bangsa Indonesia melainkan berjuang untuk daerahnya. Jadi perjuangan dari berbagai wilayah nusantara sebelum tahun 1908 itu pergerakan yang masih bersifat kedaerahan," ujar Kisnu.

Menurut Kisnu, wawasan kebangsaan memiliki dua tujuan utama,

yakni untuk membangun karakter/ jati diri bangsa, serta membangun sistem nasional. "Ini penting, karena suatu bangsa harus punya jati diri, kita berbeda dengan bangsa lain. Yang kedua membangun sistem nasional dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Hancurnya suatu bangsa ketika sistem nasionalnya tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Kisnu berpesan kepada mahasiswa sebagai calon guru PPKn untuk selalu menjunjung tinggi rasa nasionalisme. "Kita ingin adik-adik dan seluruh komponen bangsa menjadi bangsa yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi dengan nilai-nilai yang terpatri di dalam dada dan terpancar di dalam pikiran. Bela negara bukan hanya manggul senjata, tapi bagaimana menjalankan fungsi dan perannya dalam rangka membela kepentingan bangsa dan negara," ujar Kisnu. ●

Partisipasi Perpustakaan Lemhannas RI dalam Perpusnas Expo 2018

Kegiatan Perpusnas Expo ini sebagai suatu terobosan dengan mengolaborasikan berbagai kegiatan yang bersifat edutainment (edukasi dan entertainment), dan Ia berharap agar kegiatan ini dapat terus dikembangkan dan dipublikasikan, agar keberadaan perpustakaan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan mengangkat tema “Pustakawan Bergerak Menebar Virus Literasi”, pameran ini bertujuan untuk mengharmonisasikan pustakawan dalam menyebarkan berbagai informasi yang bersumber dari perpustakaan, sehingga penyebaran virus ini dapat ditularkan sampai kepada masyarakat luas.

“Inilah yang kami maksud bahwa pustakawanlah yang terus bergerak untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi saudara-saudara yang sangat membutuhkan informasi di daerahnya masing-masing,” ujar Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando dalam sambutannya pada saat meresmikan kegiatan Perpusnas Expo.

Perpusnas Expo tidak hanya dimeriahkan dengan stan-stan pameran dari berbagai perpustakaan kementerian dan lembaga, tetapi diisi juga dengan kegiatan menarik seperti bedah buku Inovasi Harga Mati dari LAN, bedah buku Sarinah dari Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Blitar, bedah buku Indonesia Virij dari Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukittinggi, bincang buku

Wastra dan Karya Perempuan Indonesia, dari Komunitas Peduli Wastra Indonesia.

Perpustakaan Lemhannas RI berpartisipasi dalam Perpusnas Expo yang digelar oleh Perpustakaan Nasional RI di Jalan Medan Merdeka Selatan No.11 Jakarta Pusat, sejak 7 - 13 Mei 2018. Pameran ini diselenggarakan dalam rangka HUT Perpusnas Ke-38 yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2018.●

“Pustakawanlah yang terus bergerak untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi saudara-saudara yang sangat membutuhkan informasi di daerahnya masing-masing”

Kepala Perpusnas RI Muhammad Syarif Bando





Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Pengarah: **Mochammad Iriawan** Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi: **Mindarto**

Redaktur Pelaksana: **Wahyu Widji Pamungkas** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Staf Redaksi: **Ni Made Vira Saraswati, Endah Heliana, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia**

Desain: **Andriansyah** Fotografer: **Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto**

Sekretariat: **Linda Purnamasari, Gatot, Ayu Novitasari** Alamat Redaksi: **Biro Humas Settama Lemhannas RI,**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110 Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <http://www.lemhannas.go.id>